

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proposal skripsi ini menganalisis peranan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) adalah organisasi di lingkup internasional dalam menangani perang saudara yang terjadi di Yaman. Hal ini penting untuk diteliti karena konflik ini terus berlanjut, menjadikan negara tersebut salah satu negara dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Studi ini mengupas peranan organisasi internasional dengan konflik yang berkelanjutan di Yaman.

Yaman adalah sebuah negara dengan pendapatan rendah yang dihadapkan pada sejumlah tantangan jangka panjang yang menghambat upaya untuk merestrukturisasi dan memajukan perekonomiannya. Kondisi ekonomi semakin terburuk karena pertikaian dan pertempuran yang sudah berlangsung selama empat tahun, melibatkan dua faksi militer, yaitu Houthi dan pemerintah yang diakui secara internasional. Konflik ini telah menghentikan proses ekspor Yaman dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, meningkatkan angka inflasi dan mengakibatkan pembekuan yang signifikan pada impor bahan bakar dan pangan.

Konflik yang sedang terjadi di Yaman telah menghadirkan negara tersebut dengan krisis kemanusiaan yang paling parah di seluruh dunia, menurut pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada konferensi di Jenewa. *“The war in Yemen is now the world’s worst humanitarian crisis, with more than*

*22 million people, three quarters of the population in desperate need of aid and protection”* (McKenzie 2018). Sejumlah 17.500 lebih penduduk sipil mengalami luka-luka atau terbunuh, dan seperempat dari total korban warga sipil yang meninggal akibat serangan udara adalah perempuan dan anak-anak. Sejumlah 20 juta lebih penduduk Yaman menghadapi risiko terkait krisis pangan, di mana 10 juta di antaranya berada dalam kondisi berpotensi mengalami kelaparan (Roth, 2019).

Konflik di Yaman telah berlangsung sejak zaman dahulu atau merupakan konflik bersejarah. Konflik tersebut diakibatkan oleh ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil Yaman. Mengingat sejarah konflik Yaman yang panjang, perselisihan ini semakin memuncak dan mencapai klimaksnya pada periode rezim Ali Abdullah II Saleh. Pada saat Yaman Utara dan Yaman Selatan menjadi satu negara, stabilitas negara belum mencapai tahap aman karena faktor sejarah konflik masa lalu, dan fenomena Arab Spring terjadi pada saat itu. Ini juga dipicu oleh pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang terbukti memiliki banyak masalah yang mempengaruhi rakyat Yaman, seperti penyelewengan, kemelatan, ketidakstabilan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang signifikan. Saleh mempunyai kemampuan untuk menyuap para militer dan pemerintah daerah demi keuntungannya. Sikap tersebut diyakini karena kedekatannya dengan pemerintah AS kepada kelompok yang menentang komunitas tradisional setempat (Hill 2017, 9-15).

Presiden otokratis Ali Abdullah Saleh terpaksa mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi. Saleh harus

meletakkan jabatan setelah gelombang protes yang dipicu oleh Arab Spring meluas ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada saat itu, Hadi berusaha untuk mengatasi berbagai masalah di Yaman, termasuk ancaman dari Al-Qaeda, pergerakan separatis di wilayah selatan, ketegangan di dalam militer, masalah kelangkaan pangan, tingginya tingkat kemiskinan dan korupsi.

Selanjutnya, muncul gerakan Houthi menjadi salah satu isu di Yaman. Houthi merupakan gerakan Syiah Zaidi yang berasal dari wilayah pegunungan di Yaman Utara, dan muncul seiring meningkatnya ketegangan dengan pemerintah Sunni. Terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak yang sama-sama mengklaim sebagai pemerintah sah Yaman.

**Gambar 1 Peta Wilayah Yaman**



Sumber : BBC 2018.

Berdasarkan gambar di atas, mempermudah untuk melihat daerah-daerah kekuasaan pemerintah Yaman dan pasukan Houthi. Satu pihak mengambil sisi pemerintahan Abd Rabbu Mansour Hadi yang bertempat di Aden, dan pihak lain memberikan dukungan terhadap pemerintahan Dewan Revolusi yang didirikan

pemberontak Houthi dan didukung oleh Ali Abdullah Saleh mantan presiden Yaman (Sebastian 2015). Perang saudara di Yaman dimulai pada tahun 2014 ketika pemerintahan Hadi memberlakukan pemotongan besar-besaran subsidi bahan bakar, yang memicu protes baru di Sanaa. Pada bulan September 2014, pasukan keamanan Yaman menembaki para pengunjuk rasa, menewaskan beberapa orang dan memicu serangkaian konfrontasi dan pertempuran yang meningkat. Pada akhir September, pejuang Houthi menyerbu Sanaa, merebut gedung-gedung penting pemerintah.

Kemudian pemberontak Houthi pemberontak Syiah yang memiliki hubungan dengan Iran dan sejarah pemberontakan melawan pemerintah Sunni mengambil alih ibu kota Yaman dan kota terbesarnya, Sanaa, menuntut harga bahan bakar yang lebih rendah dan pemerintahan baru. Angkatan bersenjata Houthi memperoleh dukungan signifikan dari rakyat Yaman dengan mengangkat isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi. Mereka berhasil memaksa pemerintahan Hadi beserta para menteri mundur. Pada bulan September, angkatan bersenjata Houthi menduduki Sanaa, ibukota Yaman, dan berlanjut hingga ke selatan, mencapai Aden, yang merupakan kota terbesar kedua di Yaman.

Pada akhir Januari 2015, pertempuran meningkat antara pasukan pemerintah dan pejuang Houthi yang menduduki ibu kota, yang berpuncak pada perebutan istana presiden oleh pemberontak. Presiden Hadi mengajukan pengunduran dirinya ke parlemen pada tanggal 23 Januari, meninggalkan negara itu tanpa presiden, dan dia kemudian ditempatkan di bawah tahanan rumah. Pada

tanggal 6 Februari, pemberontak Houthi meresmikan perebutan kekuasaan mereka, membubarkan parlemen dan mengumumkan bahwa dewan presidensial yang beranggotakan lima orang akan membentuk pemerintahan transisi. Pada tanggal 15 Februari Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan pemberontak Houthi dan menyerukan mereka untuk kembali ke proses transisi yang dimulai pada tahun 2013 (Britannica 2020).

Selain mempengaruhi stabilitas negara, konflik ini juga memunculkan kekhawatiran Arab Saudi terhadap kemungkinan ideologi yang diusung oleh Houthi mampu mengancam eksistensi ideologi Sunni yang menjadi dasar bagi Arab Saudi. Sehingga pada akhirnya, Arab Saudi membentuk persekutuan dengan Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Yordania, Sudan, Maroko, Mesir, beserta negara-negara lain untuk campur tangan dalam konflik akibat angkatan bersenjata Houthi di Yaman. Ada juga yang mengatakan bahwa alasan lain intervensi Arab Saudi di Yaman bukan hanya karena perbedaan ideologi yang dibawa oleh Houthi, namun juga karena Arab Saudi memperhatikan lokasi geografis Yaman dan meyakini bahwa Yaman mempunyai potensi dibidang sumber daya dan kesuburan tanah.

Amerika Serikat rutin melakukan serangan udara terhadap al-Qaeda dan ISIS di Yaman. AS juga mengklaim telah mengirim sejumlah pasukannya di lapangan dalam konflik tersebut. Selain itu, Amerika Serikat bersama negara-negara barat lainnya, seperti Inggris dan Perancis, menyediakan senjata dan intelijen kepada koalisi pimpinan Saudi.

Pada bulan Juli tahun 2016, kelompok Houthi dan pemerintahan yang dipimpin oleh mantan Presiden Saleh, yang telah digulingkan dari kekuasaan pada tahun 2011 setelah hampir tiga dekade memegang kekuasaan, mengumumkan pendirian sebuah dewan politik untuk mengelola pemerintahan di Sanaa serta sebagian besar daerah utara Yaman. Pada bulan Desember tahun 2017, Saleh mengakhiri aliansinya dengan Houthi dan memobilisasi pengikutnya untuk bersiap-siap untuk konfrontasi melawan mereka. Saleh akhirnya tewas dan pasukannya mengalami kekalahan dalam waktu dua hari.

Pada tahun 2018, pasukan koalisi melakukan serangan di pantai utara menuju kota strategis Hodeidah, pelabuhan utama di Yaman utara. Pertempuran tersebut berakhir dengan gencatan senjata dan komitmen untuk menarik pasukan dari kota; gencatan senjata dan komitmen untuk menarik pasukan dari kota; gencatan senjata sebagian besar berhasil, tetapi pertempuran terus berlanjut di tempat lain. Taiz, kota terbesar di Yaman, juga tetap menjadi titik pertikaian utama karena telah diblokade oleh Houthi sejak tahun 2015. Pada tahun 2020, UEA secara resmi menarik diri dari Yaman, namun tetap mempertahankan pengaruhnya yang luas di negara tersebut.

Pada bulan Februari 2021, kelompok pemberontak Houthi melancarkan serangan dengan maksud merebut Marib, yang merupakan benteng terakhir pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Pada awal Maret, kelompok pemberontak Houthi juga melaksanakan serangan udara menggunakan rudal di wilayah Arab Saudi, yang mencakup penyerangan terhadap kapal tanker, fasilitas minyak, serta bandara internasional. Koalisi pimpinan Saudi menanggapi

peningkatan serangan dengan serangan udara yang menargetkan Sanaa, ibu kota Yaman. Serangan tersebut merupakan bentrokan paling mematikan sejak, menewaskan ratusan pejuang dan mempersulit perdamaian.

Intervensi yang dilakukan Arab Saudi dan sekutunya telah memberikan dampak yang sangat merugikan bagi penduduk Yaman, termasuk krisis kemanusiaan yang mengancam kelangsungan hidup, keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar masyarakat. Adanya faksi kelompok pemberontak mengakibatkan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi melarikan diri ke luar negeri. Menurut PBB 60 persen dari perkiraan 377.000 kematian di Yaman antara tahun 2015 dan awal tahun 2022 adalah akibat dari penyebab tidak langsung seperti kerawanan pangan dan kurangnya layanan kesehatan yang dapat diakses. Dua pertiga penduduknya, atau 21,6 juta warga Yaman, masih sangat membutuhkan bantuan (UNHCR 2023). Lima juta orang berisiko mengalami kelaparan, dan wabah kolera telah berdampak pada lebih dari satu juta orang. Semua pihak yang berkonflik dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Sejumlah kisaran 85.000 anak di bawah usia lima tahun telah kehilangan nyawa mereka akibat kelaparan sejak koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi terlibat dalam konflik di Yaman. Menurut laporan dari Save The Children, berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hampir 84.700 anak mengalami masalah gizi yang parah.

Dilihat dari latar belakang di atas, terlihat jelas bahwa konflik angkatan bersenjata Houthi dan pemerintah Yaman yang memuncak menjadi perang saudara diakibatkan banyak mendapat campur tangan asing dengan dalih

meredakan konflik. Namun nyatanya, intervensi negara lain justru memperburuk keadaan, terutama bagi masyarakat sipil yang sangat terkena dampak perang. Kemudian muncullah pertanyaan apakah perang ini akan berakhir agar tidak terjadi krisis kemanusiaan yang makin memburuk.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ialah sebuah badan organisasi internasional terbesar dalam sejarah kerjasama dan pembangunan antar negara di seluruh aspek kehidupan internasional. Maka dari itu, salah satu tugas utama PBB adalah penyelesaian kejadian-kejadian internasional. Seperti yang diungkapkan pada prambanan Piagam PBB:

*“We the peoples of the united nations determined to save succeeding generations from the scourage of war...”* (PBB berupaya melindungi generasi masa depan dari penderitaan perang).

Oleh karena itu, sangat diharapkan PBB untuk memainkan peran yang aktif dalam penyelesaian konflik antar negara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, PBB juga diinginkan untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan tujuan mengakhiri pertempuran sesuai dengan prinsip dan objektif yang terkandung dalam Piagam PBB. Fenomena ini akan membahas implikasi dari keterlibatan PBB sebagai organisasi internasional dalam upaya mencapai perdamaian dalam konflik perang saudara di Yaman selama periode 2015 hingga tahun 2022.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan penjelasan mengenai konteks permasalahan sebelumnya, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana implikasi keterlibatan PBB dalam menangani Perang Saudara di Yaman tahun 2015-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implikasi yang ditimbulkan oleh peran PBB dalam upaya menyelesaikan konflik perang saudara di Yaman melalui serangkaian tindakan atau upaya dan inisiatif yang dilakukan oleh PBB.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dan tujuan yang telah disajikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menginginkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah akademis maupun implementasinya di dunia nyata.

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Dalam konteks akademis, penelitian ini memiliki nilai dalam pengembangan studi hubungan internasional yang berfokus pada upaya

penanganan atau respons terhadap konflik melalui peranan PBB sebagai organisasi internasional.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk menyediakan wawasan yang mendalam dengan penyajian analisis yang komprehensif mengenai peran yang dapat diambil oleh PBB sebagai organisasi internasional dalam mengurus perang saudara di Yaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya, dengan tujuan lebih mengutamakan isu ini dan mendorong pencapaian perdamaian yang utuh di tingkat internasional.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang Implikasi Peranan PBB dalam Penyelesaian Perang Saudara di Yaman (2015-2022).

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian yang menjelaskan

tentang Peranan PBB dalam Penyelesaian Perang Saudara di Yaman (2015-2022).

### BAB III SEJARAH PERANG SAUDARA DAN DAMPAKNYA

Bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai sejarah memuncaknya perang saudara di Yaman yang diakibatkan oleh intervensi aktor-aktor internasional dan berdampak terhadap krisis kemanusiaan di Yaman.

### BAB IV PERANAN PBB DALAM PENYELESAIAN PERANG SAUDARA DI YAMAN

Bab 4 membahas peranan PBB yang telah dilakukan dan dampak yang dihasilkan melalui *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* terhadap penurunan eskalasi konflik dan krisis kemanusiaan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.